

# Roadmap WBK 2018-2022

REFORMASI BIROKRASI MENUJU LAYANAN PRIMA ORGANISASI



**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**  
Jalan Raya Parung Km. 22-23, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Indonesia

## DAFTAR ISI

Sampul.....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Visi dan Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata .....	2
3. Tujuan Pembangunan Zona Integritas WBK .....	3
4. Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas WBK.....	3
5. Kunci Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas WBK.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM .....	5
1. Gambaran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.....	5
2. Gambaran Umum Pembangunan Zona Integritas WBK.....	7
BAB III PROGRAM DAN TARGET PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK .....	14
1. Manajemen Perubahan .....	14
2. Penguatan Tata Laksana.....	14
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM.....	14
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja .....	14
5. Penguatan Pengawasan.....	14
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .....	14
BAB IV. PENUTUP .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Internal merupakan program pendukung dari sembilan agenda prioritas presiden dan wakil presiden yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi/institusi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, Menteri PANRB telah menerbitkan Peraturan No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berkomitmen melakukan upaya percepatan pencegahan korupsi dan mewujudkan Aparatur Kemendikbud RI yang bersih dan melayani melalui penancangan Zona Integritas serta membangun birokrasi yang kuat, akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik. Komitmen tersebut secara nyata diwujudkan melalui penancangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendikbud RI yang dicanangkan pada tanggal 6 Oktober 2015.

Reformasi Birokrasi Internal yang dilaksanakan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata merupakan program penguatan lembaga agar mampu melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi lembaga yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 16 tahun 2015. Dalam rangka mendukung program RB dibangun program Wilayah Bebas dari Korupsi untuk mempercepat pencapaian sasaran. Agar berkesinambungan antara program setiap tahunnya makaperlu disusun Road Map yang mampu mengenali kondisi organisasi saat ini dan melakukan identifikasi permasalahan yang ada. Hal ini akan membantu percepatan pencapaian tujuan bersama, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melayani”.

## 2. Visi dan Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Ditjen GTK dan merumuskan Misi berdasarkan Misi Kementerian maupun Ditjen GTK. Dalam rangka membuat benang merah antara Misi Kementerian, Misi Ditjen GTK dan Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata berikut ini disampaikan uraian Misi tersebut.

Visi Kemendikbud: **"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi Kemendikbud:

- Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan
- Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- Mewujudkan pelestarian Kebudayaan dan Pembembangan Bahasa
- Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan strategik Kemendikbud 2015-2019:

- Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
- Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
- Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
- Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
- Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Visi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah: "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong."

Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah:

- Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan bisnis dan pariwisata yang profesional untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- Memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan bisnis dan pariwisata berdaya saing internasional untuk mewujudkan insan yang mulia dan berkarakter,
- Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan pendidik bisnis dan pariwisata,
- Memberikan dan meningkatkan layanan prima kepada para pemangku kepentingan.

### **3. Tujuan Pembangunan Zona Integritas WBK**

Tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah meningkatkan kinerja pelayanan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis untuk mencapai tata kelola institusi pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur sipil negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab serta selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta bagi masyarakat/publik.

### **4. Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas WBK**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam pengembangan Zona Integritas WBK meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- f. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- i. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
- j. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

## **5. Kunci Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas WBK**

Dalam rangka mendukung pencapaian ZI-WBK, nilai-nilai Kemendikbud yang harus ditegakkan dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya Visi dan Misi Organisasi, meliputi:

- a. Memiliki Integritas  
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.
- b. Kreatif dan Inovatif  
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru
- c. Inisiatif  
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.
- d. Pembelajar  
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.
- e. Menjunjung Meritokrasi  
Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.
- f. Terlibat Aktif  
Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
- g. Tanpa Pamrih  
Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan Dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **1. Gambaran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata**

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Tugas yang diemban adalah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sesuai Permendikbud Nomor 16 tahun 2015 terdiri dari:

- a. Kepala,
- b. Kepala Bagian Umum,
- c. Kepala Bidang Program dan Informasi,
- d. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi,
- e. Kasi Program,
- f. Kasi Data dan Informasi,
- g. Kasi Penyelenggaraan,
- h. Kasi Evaluasi,
- i. Kasubag Tatalaksana dan Kepegawaian,
- j. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran,
- k. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga,
- l. Koordinator Widyaiswara dengan anggota 61 orang yang terdiri dari 10 kelompok kompetensi, yaitu:
  - 1) Akomodasi Perhotelan,
  - 2) Tata Kecantikan,
  - 3) Tata Busana,
  - 4) Tata Boga,
  - 5) Usaha Perjalanan Wisata,
  - 6) Administrasi Perkantoran,
  - 7) Akuntansi,
  - 8) Bisnis dan Pemasaran,
  - 9) Pekerjaan Sosial, dan
  - 10) Teknologi Pendidikan.

Terkait area perubahan dalam RBI, upaya yang telah dilakukan meliputi:

#### **a. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu organisasi untuk memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan perubahan seluruh komponen organisasi harus memiliki kesiapan untuk berubah, yang diawali dari perubahan *mindset* selanjutnya pola laku sebelum menjadi karakter.

Manajemen perubahan telah dilaksanakan pada sebagian besar pejabat, JFT dan JF di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan berbagai cara, misalnya: setiap pertemuan (*manajemen* maupun *ekstended*) melaksanakan sosialisasi RB-WBK dan membahas peningkatan kualitas layanan. Berbagai poster sosialisasi program RB-WBK dan budaya kerja kerja telah dipasang pada tempat strategis.

#### **b. Penguatan Sistem Pengawasan**

Dalam rangka Reformasi Birokrasi, pengawasan merupakan bagian yang sangat penting. Sesuai program kerja Inspektorat Jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) PPPPTK Bisnis dan Pariwisata melakukan pemberdayaan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas internal dan mitra pimpinan.

Penguatan sistem pengawasan masih terbatas pada pembentukan SPI dan persiapan format monitoring. Beberapa kegiatan monitoring telah dilaksanakan namun belum intensif dilakukan. Analisis kepada Tim SPI telah dilakukan hasil analisis konflik kepentingan. Telah dilakukan perubahan Tim SPI memperhatikan masukan Itjen Kemdikbud. Kotak pengaduan telah dipasang namun belum ditangani oleh Tim SPI.

#### **c. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata didukung dengan menggunakan *software* SAKIP dari Kementerian Kemendikbud. SAKIP memuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja sehingga harus menyusun laporan (LAKIP). TIM SAKIP dan LAKIP di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata selalu mengikuti pembinaan sesuai kebijakan Kemendikbud.

#### **d. Penguatan Tata Laksana**

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid, transparan, dan akuntabel. Keramah tamahan budaya timur selalu mewarnai layanan bermutu yang diberikan dan pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi.

Program reformasi birokrasi pada area Penguatan Tata Laksana yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Penyusunan draft Standar Pelayanan Kemendikbud,
- 2) Pemanfaatan Komputer dalam pengelolaan organisasi, meliputi:



- a) SIM Diklat yang dalam proses pengadaan barang dan jasa di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sesuai peraturan yang berlaku,
- b) Sistem kehadiran *Fingerprint* yang digabung dengan sistem pembayaran TUKIN yang telah dibangun sejak 2014,
- c) Pemanfaatan SIMAK BMN, SAI, dan lain-lain.

#### e. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur yang dilaksanakan organisasi meliputi: perencanaan, penilaian kinerja, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan standar kompetensi, serta administrasi kepegawaian.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi:

- 1) Pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi diklat, misalnya SIM Diklat, SIMPEG, Integrasi kehadiran dengan Fingger print terhubung dengan perhitungan tunjangan uang makan dan tunjangan kinerja sejak tahun 2013.
- 2) Penyusunan uraian jabatan pada semua staff (59 Jabatan) tahun 2011
- 3) Penyusunan standar kompetensi manajerial tahun 2014
- 4) Penyusunan Standar kompetensi teknis tahun 2015
- 5) Penyusunan Job Performance Standar tahun 2015
- 6) Pembuatan Laporan Kinerja berdasarkan pekerjaan riil disetiap unit kerja
- 7) Laporan Produktivitas pegawai setiap tahun

#### f. Peningkatan Kualitas Layanan

Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud meliputi: 1) pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 3) penghargaan dan perlindungan, 4) kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Terkait area kerja Layanan guru dan Tenaga Kependidikan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata secara eksplisit memiliki tugas **“peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan”**.

Ada berbagai layanan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang merupakan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Layanan tersebut meliputi:

- 1) Diklat Teknis bagi Guru
- 2) Diklat Teknis bagi Tenaga Kependidikan
- 3) Nara Sumber Kegiatan Pengembangan Kompetensi
- 4) Konsultasi pengembangan kompetensi

## 2. Gambaran Umum Pembangunan Zona Integritas WBK

Reformasi Birokrasi Internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata merupakan rangkaian program/ kegiatan untuk mengungkit kualitas layanan organisasi sehingga mendukung pencapaian Misi Ditjen GTK dan selanjutnya Misi Kemendikbud. Area Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan meliputi delapan area perubahan, namun dua area perubahan dilaksanakan oleh unit utama,

yaitu Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata merupakan UPT dan sekaligus pengguna, maka yang wajib dilaksanakan hanya 6 area perubahan.

Pembangunan WBK meliputi enam area perubahan, yaitu:

**1. Program Kerja Manajemen Perubahan**

Menyusun Tim WBK, Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan/ Program Kerja WBK, Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja WBK, dan Melakukan Perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja.

**2. Program Kerja Penataan Tata Laksana**

Menyusun Proses Operasional Standar Bisnis (POS) Kegiatan Utama, Menerapkan Kantor Elektronik (*E-Office*) dan Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

**3. Program Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM ASN**

Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Pola Mutasi Internal, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Disiplin/ Kode etik, dan Meningkatkan SIMPEG.

**4. Program Kerja Penguatan Akuntabilitas**

Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja/ Renstra, IKU, IKK.

**5. Program Kerja Penguatan Pengawasan**

Mengendalikan Gratifikasi, LHKPN, LHKASN, Penerapan SPIP, Mengelola Pengaduan Masyarakat, Merancang penerapan *Whistle Blower Sistem* dan Penanganan Benturan Kepentingan.

**6. Program Kerja Peningkatan Mutu Pelayanan Publik**

Menyusun dan Menetapkan Standar Layanan, Menerapkan Budaya Pelayanan Prima, dan Penilaian Kepuasan Layanan

Secara umum gambaran menyeluruh program pengembangan ZI WBK PPPPTK Bisnis dan Pariwisata disampaikan pada gambar 1.



# Road Map Menuju WBK /WBBM

2018	2019	2020	2021	2022
	Membangun WBBM	Mengusulkan WBBM	Pengesahan WBBM	Pengembangan Layanan
	Pengesahan WBK	Membangun WBBM	Mengusulkan WBBM	
	Mengusulkan WBK	Membangun WBBM	Membangun WBBM	
	Membangun WBK			
Rintisan WBK				

## Program Prioritas

Penyusunan Tim RB dan ZI-WBK	Penyempurnaan Tim RB dan ZI-WBK	Penyempurnaan Tim RB dan ZI-WBK	Penyempurnaan Tim RB dan ZI-WBK	Penyempurnaan Tim RB dan ZI-WBK
Sosialisasi program kepada masyarakat PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	Penjaringan dan perumusan program pengembangan WBK	Penjaringan dan perumusan program pengembangan WBK	Pelaksanaan program, evaluasi dan pengembangan	Pelaksanaan program, evaluasi dan pengembangan
Identifikasi kebutuhan pengembangan budaya kerja	Sosialisasi budaya kerja dan peninjauan rumusan budaya kerja	Sosialisasi budaya kerja dan peninjauan rumusan budaya kerja	• Sosialisasi budaya kerja • Penerapan budaya kerja dan pengembangan	• Sosialisasi budaya kerja • Penerapan budaya kerja dan pengembangan
Identifikasi kebutuhan penataan SDM	Pembangunan sistem manajemen SDM	• Sosialisasi sistem kepegawaian • Pelaksanaan sistem kepegawaian	• Sosialisasi sistem kepegawaian • Pelaksanaan sistem kepegawaian	• Sosialisasi sistem kepegawaian • Pelaksanaan sistem kepegawaian
Identifikasi kebutuhan pengembangan kepengawasan	• Pengelolaan gratifikasi • Penerapan SPIP	• Pengelolaan gratifikasi • Penerapan SPIP	• Pengelolaan gratifikasi • Penerapan SPIP	• Pengelolaan gratifikasi • Penerapan SPIP
Identifikasi teknis pengembangan pengaduan masyarakat dan WBK	Penjaringan dan perumusan program pengaduan masyarakat dan WBK	Pemantapan SOP Pengaduan masyarakat • Pemantapan WBS	• Pengelolaan Pengaduan • Penerapan WBS	• Pengelolaan Pengaduan • Penerapan WBS
Identifikasi teknis pengembangan e-office	Pengembangan e-office (Kehadiran, kepegawaian, tunjangan kinerja, pelaksanaan diklat, persuratan, Pengelolaan BMN )	Pengembangan e-office (Kehadiran, kepegawaian, tunjangan kinerja, pelaksanaan diklat, persuratan, Pengelolaan BMN )	Pelaksanaan e-office	Pelaksanaan e-office
Identifikasi Layanan	Penataan SOP dan Standar Layanan Utama	• Layanan Diklat Online • Layanan Uji Kompetensi keahlian	• Layanan Diklat Online • Layanan Uji Kompetensi keahlian	• Layanan Diklat Online • Layanan Uji Kompetensi keahlian

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN TARGET PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK**

#### **1. Manajemen Perubahan**

- a) Menyusun Tim WBK,
- b) Menyusun Dokumen Roadmap Pembangunan WBK,
- c) Menyusun Dokumen Program Kerja WBK,
- d) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja WBK,
- e) Melakukan Perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja.

#### **2. Penguatan Tata Laksana**

- a) Menyusun Proses Operasional Standar Bisnis (POS) Kegiatan Utama,
- b) Menerapkan Kantor Elektronik (E-Office),
- c) Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

#### **3. Penguatan Sistem Manajemen SDM**

- a) Menyusun Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi,
- b) Menerapkan Pola Mutasi Internal,
- c) Melaksanakan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi,
- d) Menetapkan Kinerja Individu,
- e) Melakukan Penegakan Disiplin dan Kode Etik,
- f) Meningkatkan SIMPEG.

#### **4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

- a) Melibatkan Pimpinan,
- b) Mengelola Akuntabilitas Kinerja.

#### **5. Penguatan Pengawasan**

- a) Mengendalikan Gratifikasi, LHKPN, LHKASN,
- b) Menerapkan SPIP,
- c) Mengelola Pengaduan Masyarakat,
- d) Merancang penerapan *Whistle Blower Sistem* (WBS),
- e) Melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan.

#### **6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- a) Menetapkan Standar Layanan,
- b) Menerapkan Budaya Pelayanan Prima,
- c) Melaksanakan Penilaian Kepuasan Layanan.

## BAB IV. PENUTUP

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata melaksanakan Pembangunan Zona Integrasi menuju WBK secara bertahap selama lima tahun mulai dari 2018 sampai 2022. Pola pikir pencapaian secara operasional dimulai dari mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas visi dan misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Kebijakan dilaksanakan melalui area perubahan: manajemen perubahan, penataan dan penguatan tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta dukungan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan institusi pemerintah yang profesional dan berintegritas. Melalui manajemen perubahan utamanya revolusi mental, implementasi program tersebut diharapkan mengubah *mind set* dan *cultural set* seluruh civitas ke arah budaya yang profesional, produktif, dan akuntabel. Proses dan sasaran Pembangunan ZI berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menuju kondisi profil lembaga yang diharapkan pada tahun 2022.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung melalui revolusi mental. Revolusi mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan organisasi di berbagai aspek. Sasaran utama revolusi mental yakni untuk mengubah *mind set* dan *culture set* dari dilayani menjadi melayani.

Dokumen road map pembangunan ZI tahun 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural JFT dan JF di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Dokumen ini tidak bermakna jika tidak dilaksanakan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Tim Pelaksana untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang pada dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaan.